

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal dasar kebutuhan manusia, sebagai makhluk sosial, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan setiap kegiatan, seperti bertani, berdagang, maupun berinteraksi dengan manusia lainnya. Untuk mencapai sehat ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu perilaku masyarakat 40%, lingkungan masyarakat 30%, pelayanan kesehatan 20% dan faktor keturunan 10%<sup>1</sup>. Artinya perilaku masyarakat memegang presentase terbesar dan diikuti oleh faktor lingkungan yang menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat, jika perilaku masyarakat itu higienis dan bersih terhadap lingkungan dan dirinya maka semakin besar kemungkinan untuk terhindar dari penyakit yang bersumber dari lingkungan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan adalah limbah. Limbah dapat ditemukan pada saluran got maupun sungai yang tercemar seperti limbah industri, limbah rumah tangga maupun limbah domestik seperti kotoran manusia, hal ini merupakan contoh dari buruknya kebiasaan dan perilaku manusia itu sendiri sehingga dampaknya datang dikemudian hari seperti bencana banjir, penyakit kulit, diare dan lain-lain.

Indonesia juga tidak lepas dari masalah kesehatan dan lingkungan, Karena buruknya kebiasaan masyarakat dan kumuhnya lingkungan, WHO/UNICEF mencatat pada tahun 2014 terdapat 55 juta penduduk Indonesia masih berperilaku buang air besar (BAB) sembarangan.

---

<sup>1</sup>Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Program Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Akibatnya lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat buruk dari BAB sembarangan. Selain penyakit, akibat perilaku tidak sehat tersebut menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan untuk menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan 100% bebas dari buang air besar sembarangan pada tahun 2019. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No 852/MENKES/IX/2008 yang kemudian diperkuat menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dikukuhkan sebagai strategi pembangunan sanitasi di Indonesia.<sup>3</sup> Target tersebut hanya dapat terlaksana dengan menggerakkan para pemimpin daerah untuk berinovasi dan aktif dalam pembangunan akses sanitasi yang lebih baik.

Pelaksanaan pembangunan sanitasi yang diapresiasi oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Buktinya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan Nila Moeloek merespon upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengembangan sanitasi, kebijakan kesehatan dan bidang kebersihan sampai tahun 2015 dengan memberikan Kota Payakumbuh penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Menteri Kesehatan RI juga mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Memilih Kota Payakumbuh sebagai tuan rumah peringatan Hari Kesehatan Sedunia Terintegrasi tahun 2015 dan *Launching* secara Nasional Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan. Terlepas dari apresiasi Menteri

---

<sup>2</sup> <http://mediakom.sehatnegeriku.com/stop-buang-air-besar-sembarangan/> diakses pada 3/4/2017 pukul 11:51 WIB.

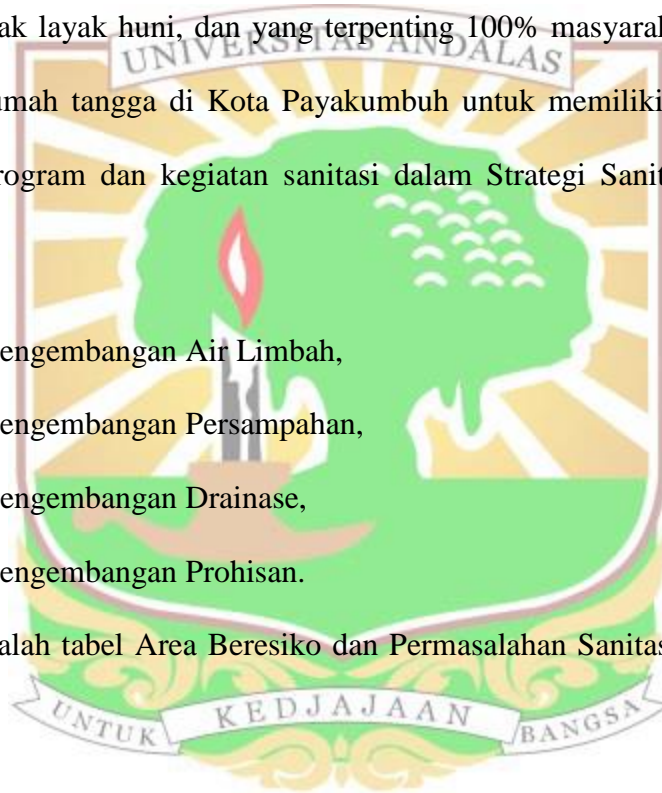
<sup>3</sup> <http://depkes.go.id/menju-100-akses-sanitasi-indonesia-2019.html/> diakses pada 4/4/2017 pukul 00:11 WIB

Kesehatan Payakumbuh juga menerima penghargaan *Government Award* 2016. Penghargaan tersebut ditujukan untuk Kota Terbaik Kategori Kesehatan oleh Sindo Weekly<sup>4</sup>.

Pengembangan akses sanitasi di Kota Payakumbuh tertuang dalam Rencana Strategi Kota (SSK) Kota Payakumbuh Tahun 2014-2019 untuk kegiatan Sanitasi seperti penyediaan air bersih, drainase, limbah dan sampah. Dalam Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disebut SSK terdapat rekomendasi yaitu target 2019 yaitu 100% penduduk sudah memanfaatkan sarana air bersih, 0% rumah tidak layak huni, dan yang terpenting 100% masyarakat bersanitasi terutama menyiapkan 100% rumah tangga di Kota Payakumbuh untuk memiliki jamban keluarga yang sehat<sup>5</sup>. Terdapat 4 program dan kegiatan sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh, diantaranya adalah<sup>6</sup> :

1. Program Pengembangan Air Limbah,
2. Program Pengembangan Persampahan,
3. Program Pengembangan Drainase,
4. Program Pengembangan Prohisan.

Berikut ini adalah tabel Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi Perkelurahan di Kota Payakumbuh.



**Tabel 1.1**

**Skoring Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi Perkelurahan di Kota Payakumbuh**

	Air Limbah		Persampahan		Drainase	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<b>Sangat Rendah</b>	67	61	37	39	60	58

<sup>4</sup>Sindo Weekly Edisi 28 Maret 2016 Halaman 76 dan 77

<sup>5</sup>Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

<sup>6</sup>Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota payakumbuh, 2014

<b>Sedang</b>	6	5	27	7	11	6
<b>Tinggi</b>	2	1	8	9	3	2
<b>Sangat Tinggi</b>	1	-	4	2	2	1

Sumber : *Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Payakumbuh dan beberapa dokumen Pemerintah Kota Payakumbuh, diolah oleh peneliti 2016*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat Program Pengembangan Air Limbah memiliki permasalahan sanitasi terendah dibandingkan dengan Program Persampahan dan Drainase sehingga berdampak pada pencapaian prestasi dari Program Pengembangan Air Limbah, untuk itu peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang Program Pengembangan Air limbah. Program tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 065.10/183/WK-PYK Tahun 2016 dengan membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL. Pokja AMPL terdiri dari 28 personil dari berbagai SKPD di Kota Payakumbuh yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dengan wakil dari Kepala Bappeda.

Program Pengembangan Air Limbah menjadi sorotan bagi publik atas pencapaian baik atas program yang dilaksanakan. Terbukti dengan tercapainya tingkat *Open Defecation Free*<sup>7</sup> (ODF) 87.79%, yang artinya 87.79% penduduk Kota Payakumbuh telah memiliki akses limbah jamban dan masyarakat telah buang air besar di jamban yang saniter. Dengan begitu limbah tinja yang akan mengancam lingkungan dan berdampak bagi kesehatan akan menurun. Kegiatan yang dilakukan dalam program Pengembangan Air Limbah bertujuan untuk:<sup>8</sup>

1. Optimalisasi fungsi pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT),

<sup>7</sup> *Open Defecation Free* adalah keadaan ketika masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan.

<sup>8</sup>Ibid. Hal IV-6

2. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik<sup>9</sup> (*on site* dan *off site*<sup>10</sup> kepadatan sedang),
3. Penambahan armada baru penyedotan tinja dan pemeliharaan armada penyedotan tinja yang ada,
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah,
5. Memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana septictank yang memenuhi syarat kesehatan.

Adanya perencanaan Program Pengembangan Air Limbah ini merupakan pembaharuan dari pelaksanaan 5 tahun terakhir dengan mempedomani Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh (SSK) tahun 2010-2014 untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak. Untuk mencapai hasil yang layak tersebut kegiatan yang dilakukan dalam Program Pengembangan Air Limbah untuk tahun 2016, yaitu :

1. Sosialisasi Sanitasi Lingkungan Sehat
2. Pembangunan IPAL
3. Pembangunan MCK
4. Pembangunan *Septictank* Individu
5. Pembangunan Toilet Umum
6. Peningkatan Operasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

6 kegiatan yang lebih banyak dari sebelumnya yang merupakan kebutuhan hasil pemetaan daerah sesuai dengan tingkat kelayakan akses per-kelurahan yang ada di Kota

<sup>9</sup> Limbah domestik menurut dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh adalah limbah yang dihasilkan oleh kotoran manusia.

<sup>10</sup> *On Site* adalah mekanisme pembuangan limbah domestik melalui sistem setempat didekat rumah pribadi, sedangkan *Off Site* adalah pembuangan limbah domestik yang menggunakan satu *septictank* komunal.



Payakumbuh. Hasil pemetaannya menunjukkan 67 kelurahan pada tingkat sangat layak, 8 kelurahan pada tingkat layak, 1 kelurahan pada tingkat cukup layak, dan tidak ada kelurahan pada tingkat tidak layak.<sup>11</sup> Artinya, akses air limbah di Kota Payakumbuh pada umumnya berada pada tingkat layak. Layaknya cakupan akses air limbah domestik ini juga didukung dengan tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, dukungan yang baik dari dana APBD untuk menciptakan akses yang 100% baik, selain itu dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat tinggi.

Namun yang menjadi kekurangan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh adalah<sup>12</sup>:

1. Kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan masih ada 14,3%,
2. Pengolahan lumpur tinja belum berfungsi dengan baik walaupun sarana dan prasarana sudah memadai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik
4. Kurang maksimalnya pendanaan yang dialokasikan untuk pengelolaan air limbah

Selain kekurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, masih adanya kebiasaan masyarakat berperilaku buang air besar sembarangan menjadi suatu tantangan dan halangan untuk mencapai *Open Defecation Free (ODF)* atau bebas BABS di Kota Payakumbuh, walaupun nantinya semua sarana dan prasarana sudah memadai dan mencukupi tetapi perilaku dan kebiasaan masyarakat masih buang air besar sembarangan di tepi kolam, saluran irigasi maupun di aliran sungai, semua usaha menjadi sia-sia saja.

---

<sup>11</sup>Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Payakumbuh, 2014

<sup>12</sup>Ibid, hal IV-5, 2014

Berdasarkan pertimbangan dan musyawarah Pokja AMPL maka di rencanakanlah Program Pengembangan Air Limbah dengan 6 kegiatan, hal ini sama seperti penjelasan oleh Staf Fungsional Umum Bappeda pada 24 Oktober 2016 sewaktu observasi awal:

“Semua kegiatan yang ada pada periode 2014-2019 merupakan hasil pemetaan, analisa kebutuhan, kelebihan dan kekurangan yang ada pada Kota Payakumbuh dan Pokja AMPL itu sendiri. sehingga adanya 6 kegiatan pada periode 2014-2019 ini.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa lahirnya kegiatan-kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan, sehingga lahirnya kegiatan optimalisasi fungsi pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestik, penambahan armada baru penyedotan tinja dan pemeliharaan armada penyedotan tinja yang ada, penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah, memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana *septictank* yang memenuhi syarat kesehatan

Untuk pembagian tugas dari 6 tujuan kegiatan Program Pengembangan Air Limbah, perlu adanya ketepatan sumber daya manusia dan spesialisasi masing-masing OPD. Bappeda selaku koordinator mempunyai tugas untuk menyusun dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah agar kegiatan ini jelas arah dan tujuannya, pengelompokkan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi dan memberikan tugas kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

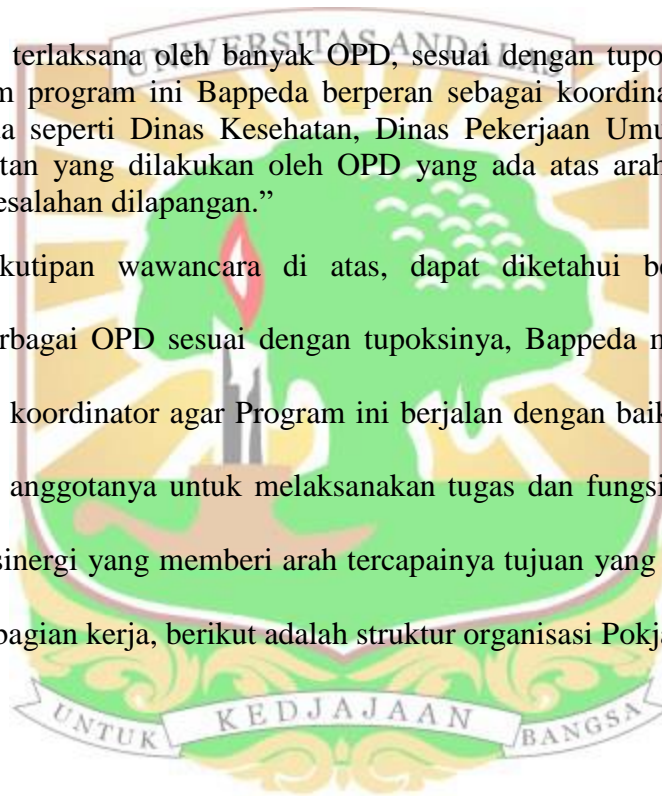
Disamping itu sumber utama pendanaan dari program ini adalah APBD Kota Payakumbuh, sebagaimana program ini adalah pembangunan dibidang sanitasi di Kota Payakumbuh, sumber lainya berupa dana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pamsimas, zakat

pegawai di Kota Payakumbuh dan dana *Corporate Social Responsibility* beberapa Bank Nasional. Banyaknya sumber dana untuk membantu kelancaran program agar terus berjalan.

Sampai saat ini program dan kegiatan berjalan sesuai fungsinya dan terkoordinir sehingga didapatkannya apresiasi dari Walikota Payakumbuh dan Pemerintah Pusat atas prestasi dari rangkaian kegiatan dari Program Pengembangan Air Limbah. Hal senada dikatakan oleh Staf Fungsional Umum di Bappeda pada 24 Oktober 2016 sewaktu observasi awal:

“Program ini terlaksana oleh banyak OPD, sesuai dengan tupoksi OPD masing-masing. Dalam program ini Bappeda berperan sebagai koordinator dari berbagai OPD yang ada seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang ada atas arahan Bappeda agar tidak terjadi kesalahan dilapangan.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai OPD sesuai dengan tupoksinya, Bappeda mempunyai andil dalam mengarahkan sebagai koordinator agar Program ini berjalan dengan baik. Penugasan yang jelas dari Bappeda kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sangat penting agar terjalin sinergi yang memberi arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih terlihatnya pembagian kerja, berikut adalah struktur organisasi Pokja AMPL :



**Tabel 1.2**  
**Struktur Organisasi Pokja AMPL**

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh



2	Wakil Ketua	Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
3	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh
4	Anggota	Bappeda
5	Anggota	Dinas Kesehatan
6	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum
7	Anggota	Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

Sumber : Keputusan Walikota Payakumbuh Tentang Pembentukan Pokja AMPL Tahun 2016, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel 1.1 tiap-tiap OPD telah diberikan tugas sesuai dengan spesialisasinya, seperti Dinas Kesehatan memiliki tugas dibidang kesehatan dan sosialisasi bagaimana seharusnya perilaku hidup yang sehat, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana *septic tank* yang memenuhi syarat kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan sarana fisik yang diperlukan masyarakat agar berperilaku hidup yang higienis seperti jamban yang memiliki standar sehat serta menyediakan dokumen kebijakan sanitasi yang berguna sebagai acuan. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan memiliki tugas mengoptimalisasi fungsi pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan penambahan armada baru penyedotan tinja dan pemeliharaan armada penyedotan tinja yang ada. Selanjutnya Bappeda mempunyai tugas mengkoordinir Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dalam pengembangan akses air limbah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut banyak OPD yang terlibat dan di koordinatori oleh Bappeda dengan cara pertemuan langsung melalui rapat maupun melalui telepon maupun *Whatsapp*.

Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas untuk menyediakan sarana dan prasarana air limbah domestik (*on site* dan *off site* kepadatan sedang) seperti pembuatan jamban beserta septictank, dan mendukung Dinas Kesehatan dalam penyuluhan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat karena banyak kegiatan dalam program ini yang dilakukan bersama-sama namun PU terfokus pada penyediaan dan pembangunan sarana akses jamban, dan tugas PU yang ketiga adalah Penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah. Sampai saat ini ditahun 2016 perkembangan sarana dan prasarana akses jamban di Kota Payakumbuh meningkat dibandingkan jumlah data awal dokumen Strategi Sanitasi Kota ditahun 2014 yang hanya 86% dan perkembangannya ditahun 2015 dan 2016.

**Tabel 1.3.**  
**Perkembangan Akses Jamban Di Kota Payakumbuh**

no	Kota	2015	2016
1	Payakumbuh	89,74%	90,38%

*Sumber : Website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2016, diolah oleh peneliti.*

Dilihat dari tabel 1.2 di atas, dapat diketahui terdapat sedikit peningkatan akses air limbah menjadi 90,38% setidaknya Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pembangunan ditahun 2015 dan tahun 2016 tetapi peningkatannya tersebut tidak begitu baik, hanya 0,64% peningkatan. Berdasarkan keadaan tersebut Dinas Pekerjaan Umum tidak banyak melakukan pembangunan akses dalam kurun satu tahun terakhir.

Namun kegiatan yang menjadi kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum adalah Penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah. Seperti disampaikan oleh Kasi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dalam kutipan wawancara observasi awal peneliti berikut pada 28 September 2016:

“sebenarnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi tentang pengelolaan limbah bukan tugas yang cocok bagi kami, seharusnya ini dikerjakan oleh Bappeda sendiri, namun diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan sampai saat ini dokumen tersebut belum ada”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas Dinas PU berasumsi kegiatan tersebut bukan keahliannya, Hal ini menyebabkan tidak berjalannya kegiatan yang seharusnya dapat terselesaikan, menurut Terry pengelompokan kegiatan-kegiatan berguna untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang menejer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Bappeda sebagai koordinator dianggap keliru oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam penugasan terhadapnya, karena soal perencanaan tersebut lebih tepat jika Bappeda yang melaksanakan.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Kasi Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum mereka terkendala dalam pembuatan jamban terutama di kelurahan Parit Rantang, tidak adanya masyarakat yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun jamban komunal bagi masyarakat yang padat penduduk didaerah tersebut, namun hal ini tidak ada solusi bersama ketika masalah ini dibawa pada rapat Pokja AMPL, sehingga jika masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya kegiatan pembangunan akses jamban didaerah tersebut dihentikan dan dialihkan didaerah lain yang membutuhkannya.

Disisi lain, kegiatan Dinas Kesehatan menyebarluaskan informasi dalam rangka mewujudkan stop BABS serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknis pengelolaan limbah domestik sesuai standar kesehatan. Penyuluhan yang dilakukan dengan cara pemician seperti yang ditegaskan Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh:

“Dalam menciptakan perilaku hidup sehat dengan buang air pada tempatnya Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan dengan metode pemician yang di fasilitasi oleh dinas kesehatan, hingga mayarakat yang dipicu sadar akan bahaya BABS dan beralih pada kebiasaan hidup sehat dengan buang air besar di jamban yang sehat”

Metode yang dimaksud Dinas Kesehatan dalam kutipan wawancara di atas pemicuan adalah dilakukan dengan membuat suatu forum yang didalamnya ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah memiliki jamban yang saniter, kelompok masyarakat yang belum memiliki jamban yang saniter, kelompok masyarakat yang sudah memiliki jamban yang saniter diberi kesempatan memberikan pemicuan dengan cara bercerita dan memotivasi masyarakat yang belum memiliki jamban yang saniter.

Sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah direncanakan, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat adalah terwujudnya masyarakat stop BABS, sampai tahun ini telah tercapai ODF 87.79%, yang artinya 87,79% penduduk Kota Payakumbuh telah buang air besar di jamban yang sesuai standar kesehatan, artinya 12,21% penduduk masih buang air sembarangan seperti ditepi kolam, disaluran irigasi, dan ditengah lahan pertanian penduduk. Dengan tingkat akses jamban 90,23% dibandingkan dengan tingkat bebas buang air besar sembarangan 87.79% artinya masih ada penduduk yang melakukan buang air sembarangan ditepi kolam, disaluran irigasi dan areal persawahan masyarakat, ini berkaitan engan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan saniter yang merupakan tugas Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi, dengan capaian yang hanya 87,79% artinya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan belum teraplikasi dalam perilaku masyarakat itu sendiri.

Tetapi untuk menyikapi masih adanya perilaku tersebut dilakukanlah sebuah pencegahan dan kontrol agar masyarakat tidak lagi buang air ditempat tersebut dengan melakukan razia jamban tidak higienis ditempat tersebut. Seperti terlihat pada gambar:



**Gambar 1.1.**  
**Pembongkaran Jamban yang Tidak Saniter oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Masyarakat**



*Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2016*

Pengawasan dari Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Kota Payakumbuh salah satunya seperti kegiatan yang dilakukan pada gambar 1.2. yaitu melakukan pembongkaran jamban tersebut agar masyarakat tidak menggunakan lagi jamban tersebut walaupun beberapa masyarakat telah memiliki jamban dengan standar kesehatan, namun tidak bisa dipungkiri masyarakat menggunakan kembali jamban itu jika tidak dilakukan pembongkaran.



Dalam kegiatan-kegiatan Pengembangan Air Limbah Bappeda mengarahkan anggotanya melalui komunikasi dari koordinator kepada anggota-anggotanya sehingga terlaksana dengan baik. Arahan, informasi, perintah yang jelas dapat dilakukan dengan komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung, secara formal maupun secara tidak formal. Adanya transfer informasi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Air Limbah di Kota Payakumbuh oleh Pokja AMPL dilakukan dengan rapat koordinasi secara formal, maupun melalui telepon. Seperti yang dijelaskan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh:

“Biasanya kami berkomunikasi dan koordinasi melalui rapat koordinasi, selain itu karena kami sudah saling mengenal satu sama lain biasanya berkoordinasi melalui telepon dengan bertukar informasi, seperti kemaren ini orang dari PU meminta alamat yang akan dibangun sarana dan prasarana jamban kepada Dinas Kesehatan”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengatakan bahwa pentingnya sebuah komunikasi langsung seperti rapat koordinasi koordinator dengan anggota dan anggota sesama anggota, disamping itu bukan hanya komunikasi yang formal saja yang bisa dilakukan dalam menggerakkan anggota, komunikasi non-formal juga efektif dilakukan seperti menggunakan telepon, asalkan komunikasi terjalin dengan baik sehingga terhindar dari tumpang tindih tugas masing-masing.

Proses pelaksanaan tugas juga tidak lepas dari pantauan Bappeda, karena memang tugas Bappeda sebagai koordinator kegiatan mengenai sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh anggota dalam pelaksanaan kegiatan dari Program Pengembangan Air Limbah, Bappeda akan melakukan monitoring kepada anggota yaitu kepada masing-masing kepala OPD. Mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan apakah sesuai atau tidaknya dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini

selaras dengan kutipan wawancara saat observasi awal peneliti dengan Staf Fungsional Bappeda pada 12 Oktober 2016:

“Untuk monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, kami melakukan monitoring dalam rapat koordinasi, jika terjadi perbedaan dalam pelaksanaan program maka Bappeda akan mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas monitoring berguna untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebab tanpa adanya tindakan kontrol maka kegiatan dikhawatirkan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kontrol berguna agar kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya untuk mencapai keberhasilan program.

Dalam melaksanakan Program Strategi Pengembangan Air Limbah oleh Pemerintah Kota Payakumbuh banyak tahapan yang dilakukan mulai dari perencanaan yang matang agar tujuan yang dimaksudkan dalam program dapat terwujud maksimal. Selain itu juga dibutuhkan pembagian tugas yang tepat, penggerakan antar lembaga yang baik sehingga membawa hasil yang baik juga. Bappeda sebagai koordinator yang manajemen semua kegiatan termasuk perencanaan awal, membagi tugas-tugas terhadap OPD sesuai dengan spesialisasi, mengarahkan anggota, menggerakkan anggota dan mengawasi semua rangkaian kegiatan yang ada. Terbukti dengan berkurangnya masyarakat yang BABS dengan tingkat ODF 87,79% dikarenakan meningkatnya akses jamban di Kota Payakumbuh 90,38%. Artinya Program Pengembangan Air Limbah berjalan dengan baik.

Berdasarkan fenomena yang ada serta capaian positif dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan Program Pengembangan Air Limbah peneliti memfokuskan pada kajian

manajemen dengan judul "Manajemen Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan Air Limbah oleh Pemerintah Kota Payakumbuh".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Urgensinya sanitasi yang layak bagi masyarakat mengharuskan semua stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat serius mengembangkan akses sanitasi bagi masyarakat. Sebab dampak buruk dari tercemarnya lingkungan akibat kontaminasi dari limbah menyebabkan penyakit yang membahayakan lingkungan. Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan Program Pengembangan Air limbah melalui Pokja AMPL, sejauh ini Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meningkatkan akses pengelolaan air limbah yang terdiri dari 6 kegiatan.

Banyaknya kegiatan dan pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan program ini memerlukan sebuah manajemen, mulai dari menentukan rencana, penyusunan organisasi dan pembagian tugas, pengarahan dan tindakan pengawasan. Sebab jika tidak ada sebuah manajemen tidak akan mungkin program ini berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Manajemen Program Pengembangan Air Limbah oleh Pemerintah Kota Payakumbuh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan Manajemen Program Pengembangan Air Limbah oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, yaitu bagaimana Pemerintah Daerah dalam memanajemen program dan

kegiatan. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

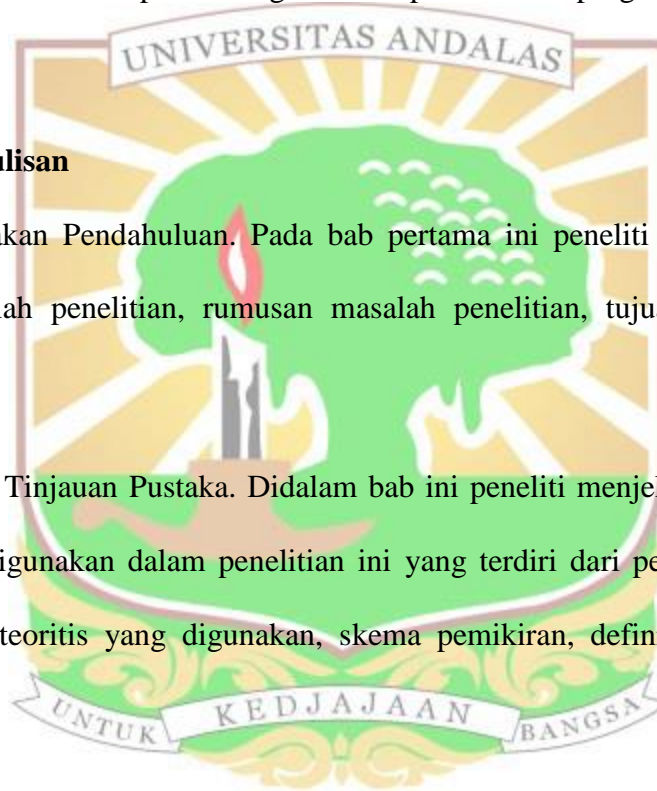
Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh Khususnya Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) dalam memanajemen sebuah program dan kegiatan yang telah dilakukan, dan untuk bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan periode selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab pertama ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa aspek teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, pendekatan teoritis yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional.

Bab III adalah Metode Penelitian. Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya adalah pendekatan penelitian dan desain penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, proses penelitian, unit analisis, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.



Bab IV adalah Deskripsi Lokasi Penelitian. Bab ini menggambarkan lokasi penelitian yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap masalah yang diteliti.

Bab V adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan

Bab VI adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan terhadap pemaparan hasil penelitian yang disertai dengan saran peneliti terhadap masalah tersebut.

